



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**UNIT KERJA** : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I WAYAN BUDIASA
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 883146

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **2.400.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/70 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 640.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **503.150.000**

1. MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 123.650.000
2. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 268.000.000
3. MOTOR, YAMAHA GRAND FILANO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 21.900.000
4. MOTOR, VESPA PRIMAVERA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 34.600.000
5. MOTOR, VESPA SPRINT Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	389.745.801
F. HARTA LAINNYA	Rp.	974.000.000
Sub Total	Rp.	4.266.895.801
III. HUTANG	Rp.	904.608.139
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.362.287.662

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.